

# Religiusitas dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945

Ahmad Sadzali

Dialektika Konstitusi  
Senin, 20 Desember 2021

Departemen Hukum Tata Negara  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

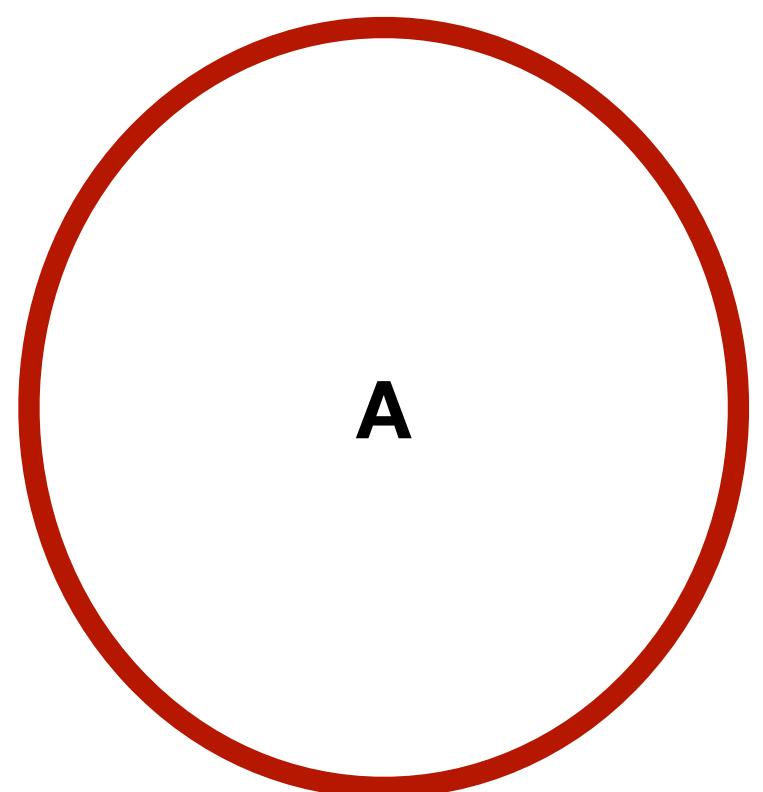


- Indonesia bukan negara agama.
- Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius.

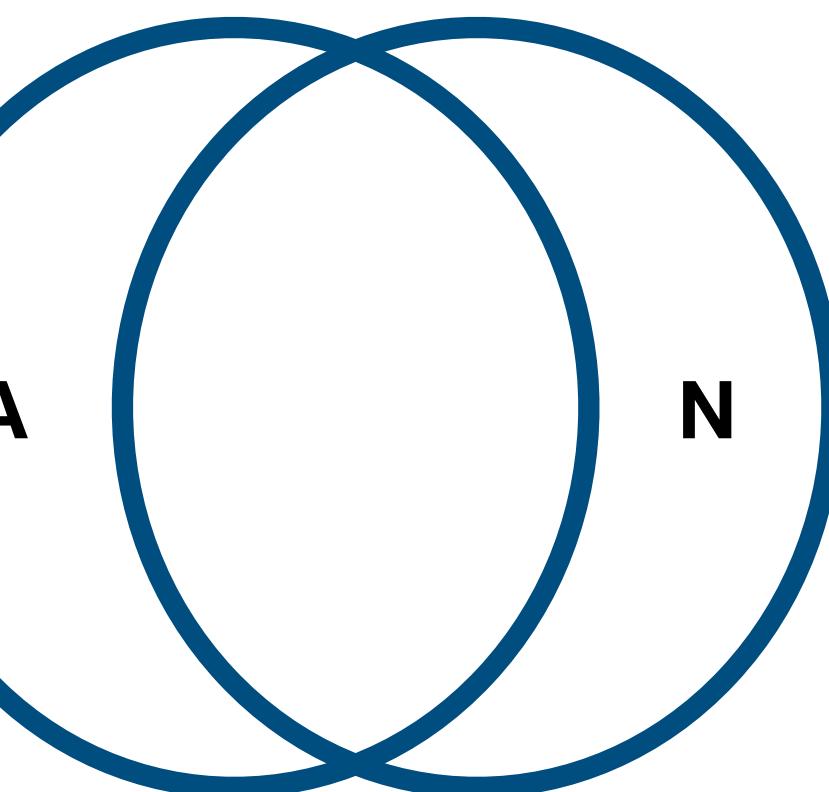
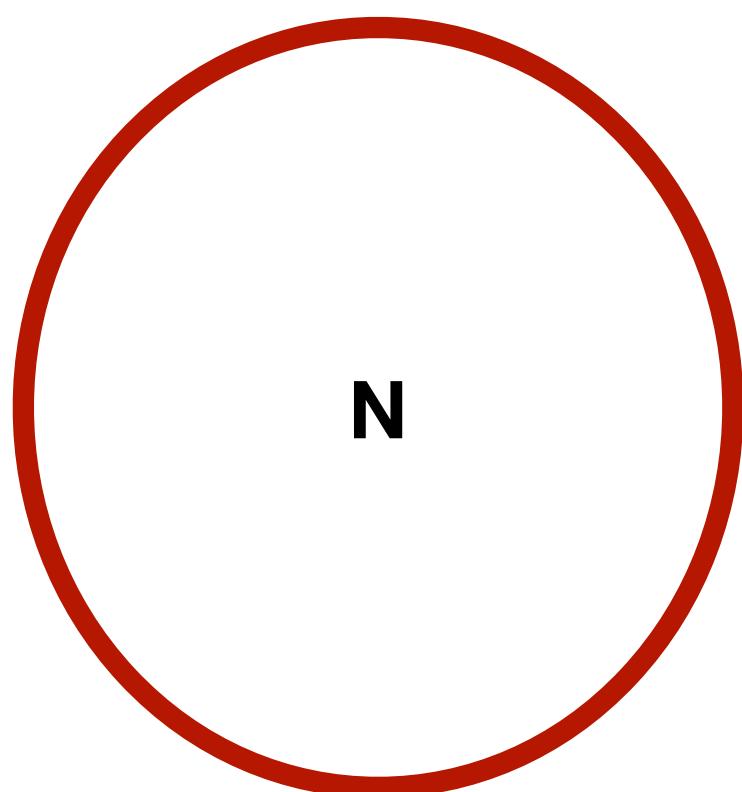




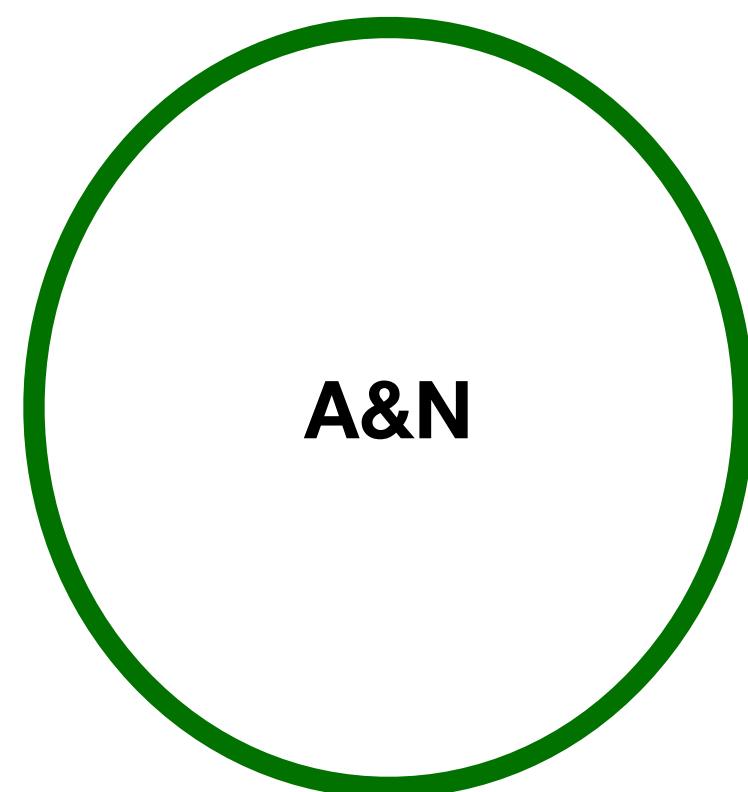
# Relasi Agama dan Negara



Sekuler



Tamyiz



Teokrasi

# Implikasi Konstitusional dari Polemik Relasi Agama-Negara di Indonesia

1. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara.
2. Pengakuan negara terhadap eksistensi agama-agama tertentu.
3. Perlakuan secara sama terhadap semua agama yang diakui.
4. Pemberian jaminan kebebasan penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama.
5. Pengakuan dan penghormatan hak-hak asasi yang mempertimbangkan nilai-nilai agama.
6. Pengembangan pendidikan nasional yang berbasis dan berorientasi pada peningkatan aspek spiritual keagamaan.

*Undang: Jurnal Hukum*

ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak)

Vol. 3 No. 2 (2020): 341-375, DOI: 10.22437/ujh.3.2.341-375

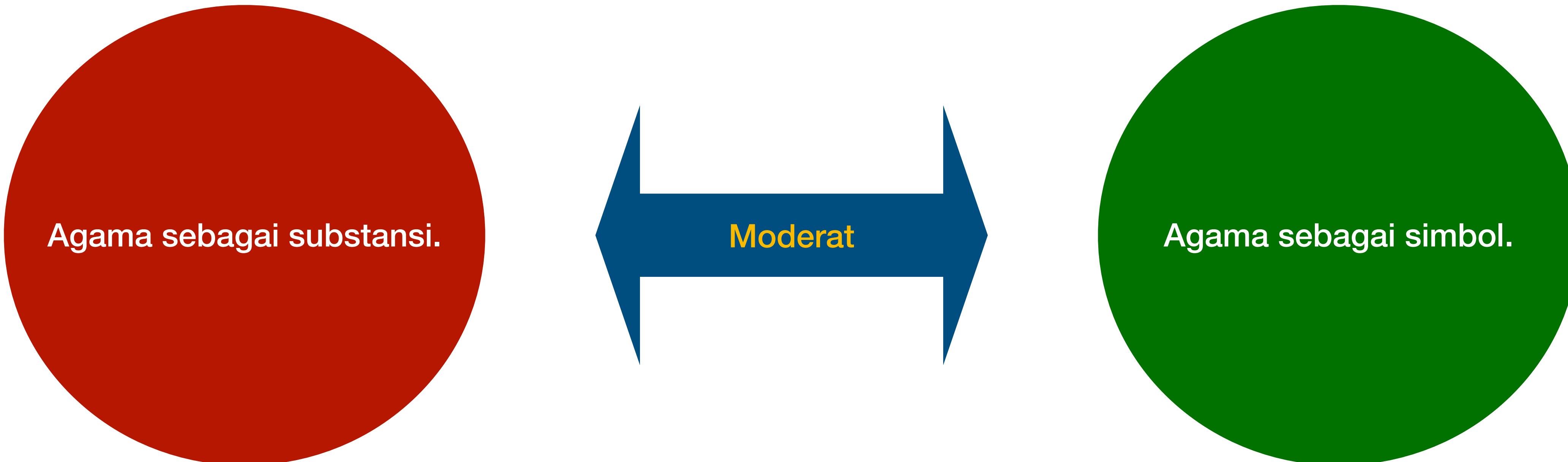
**Hubungan Agama dan Negara di Indonesia:  
Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan  
dan Perubahan Konstitusi**

*Ahmad Sadzali*

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

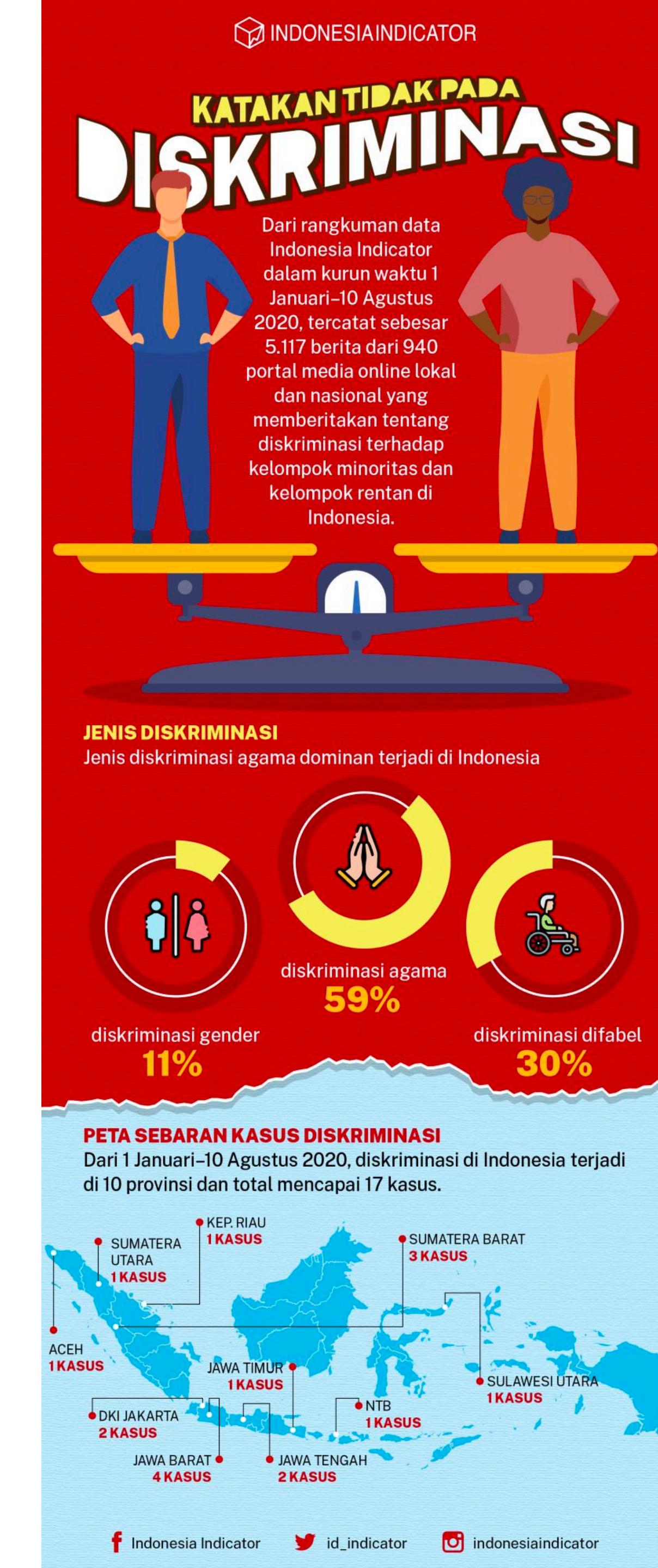
*sadzali@uii.ac.id*

# Agama: Antara Simbol dan Substansi



# Tantangan Religiusitas

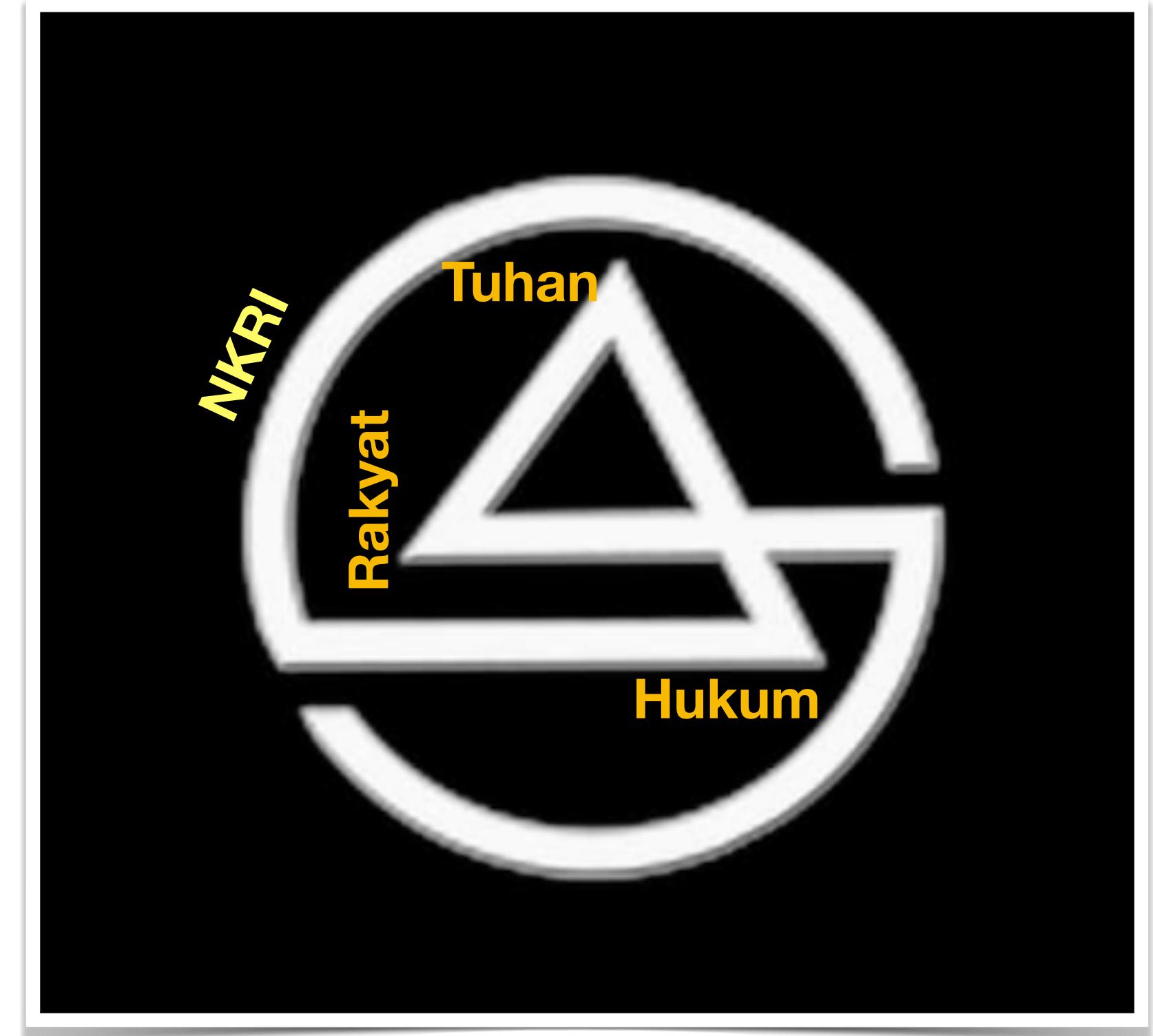
- Ekstrimisme beragama.
- Muslim sentris.
- Intoleransi dan diskriminasi berbasis agama.
- Kekeliruan paradigma “minoritas”.



[klik]

# Memaknai Religiusitas dalam Pancasila dan UUD 1945

- Tiga keadaulatan: Tuhan, rakyat dan hukum.
- Implementasi Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, tidak secara formalis, tetapi secara hakikat.
- Beragama secara moderat.





“Apabila pemimpin dan sekretarisnya berkhianat,  
apabila hakim di dunia menipu,  
Maka celaka dan sungguh celaka,  
karena dunia akan dihakimi oleh hakim akhirat.”

***Buhlul Al-Majnun***